

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M. F. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Admin Diskominfo Wabup Dompu. (n.d.). *Serahkan Sertifikat Tanah Untuk Masyarakat*. Retrieved Desember 20, 2021, from <https://diskominfo.dompukab.go.id/baca-berita-1146-wabup-dompu-serahkan-sertifikat-tanah-untuk-masyarakat-.html>
- Ali, M. (2021, Oktober 3). *Petugas PTSL Kelurahan Dorotangga*. (T. F. Gustaman, Interviewer) Kabupaten Dompu: 2021.
- Arba, H. (2015). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: PT Rineka Cipta.
- Arisaputra, & et al. (2017). Akuntabilitas Administrasi Pertahanan Dalam Penerbitan Sertifikat. *Mimbar Hukum*, 29(2).
- ATR/BPN, M. (2018). *Indonesia Patent No. 6*.
- ATR/BPN, M. (2018). *Indonesia Patent No. 6*.
- Awalludin. (2021, Oktober 1). *Kepala Seksi Pentaan dan Pemberdayaan Kantor Pertahanan Kabupaten Dompu*. (T. F. Gustaman, Interviewer) Kabupaten Dompu.
- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial; Format – Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press.
- D, R. N. (2003). Kebijakan Publik. In *Formulasi, Implementasi dan EValuasi* (pp. 219-220). Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Daulay, S. (2018). Penerapan asas-asas umum pemerintah yang baik terhadap pengaturan perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah periode tahun 2005-2016 (studi kasus pengaturan di daerah provinsi). *Doctoral Thesis*.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu. (n.d.). *Kondisi Geografis*. Retrieved Desember 20, 2021, from <https://dompukab.go.id/gambaran-umum/kondisi-geografis>
- Direktorat Jenderal Hubungan Keagrariaan. (2017). *Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis*. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional.
- Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan. (2016). *Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap*. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional.
- Fadhilurrohma, M. D. (2018). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Di Kabupaten Dompu. *Skripsi*, 9.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2007). Dualisme Penelitian Hukum. *Pustaka Pelajar*, 114.

- Hamler, H. (2018). Hukum Tanah dalam Hak Komunal Masyarakat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, IV(3), 47-57.
- Handoko, W. (2014). *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Harsono, B. (2008). Hukum Agraria Indonesia. In *Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (p. 474). Jakarta: Djambatan.
- Hasibuan. (2008). Electronic Government for Good Government. *Jurnal System Informasi dan Manajemen Teknologi Informasi*, (1), 47.
- HR, R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ilham. (2021, Oktober 3). *Masyarakat Peserta PTSL Kecamatan Dompu*. (T. F. Gustaman, Interviewer) Kabupaten Dompu.
- Indonesia. (2018). *Indonesia Patent No. 6*.
- Indonesia. (2018). *Indonesia Patent No. 6*.
- Indonesia, P. (2014). *Indonesia Patent No. 23*.
- Jateng, H. (n.d.). Retrieved Juli 30, 2021, from jatengprov.go.id: <https://jatengprov.go.id/publik/pronabukan-bagi-bagi-sertifikat/>,
- Kolopaking, A. A. (2013). *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Mohammad, & et al. (2018). Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 1(1)(7).
- Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(1), 88-101.
- Mukmin, Z. (2011). Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia). *Jurnal Hukum: IUS QUIA IUSTUM*, 18, 12.
- Muljono, E. B. (2013). Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa untuk Menjual yang Dibuat oleh Notaris. *Independen: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 1(2), 59-70.
- Muljono, W. (2012). *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Ombudsman RI Perwakilan NTB. (2017). *Menonjol Pengaduan Pertahanan*. Retrieved Desember 20, 2021, from Ombudsman NTB: <https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-ntb--2017-menonjol-pengaduan-pertanahan>
- P, A. R. (n.d.). *Pengaduan Layanan Publik NTB*. Retrieved Desember 2021, 2021, from Pemda Menempati Urutan Tertinggi: <https://www.tagar.id/pengaduan-layanan-publik-di-ntb-pemda-menempati-urutan-tertinggi>

- Pahdi, M. (2021). Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Pada Pensertifikatan Tanah Di Badan Pertahanan Nasional Kota Banjarbaru. *JIEB: Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 7(1), 4.
- Parlindungan, A. (1999). *Pendaftaran Tanah di Indonesia, (Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997)*. Bandung: Mandar Maju.
- Perangin, E. (1986). *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- R, H. (1983). *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Karya Dharma Institut Ilmu Pemerintahan.
- Rachmawati, S. A. (2021). Revolusi Sistem Pencatatan Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Studi Lapangan di Desa Bantul. *Jurnal Pranata Hukum*, 3(1).
- Rajiv. (2020). Retrieved Agustus 1, 2021, from kupasmerdeka.com: <https://www.kupasmerdeka.com/2020/09/di-bondongan-bogor-selatan-proses-ptsl-nyangkut-2-tahun-setelah-pungut-biaya-hingga-rp12-juta/>
- Ramadoni. (2021, Oktober 2). *Koordinator Pengukuran Pelaksanaan PTSL Kabupaten Dompu*. (T. F. Gustaman, Interviewer) Kabupaten Dompu.
- Redaksi DS. (n.d.). *Didominasi Sektor Pendidikan*. Retrieved Desember 20, 2021, from Ombudsman NTB Terima 305 Pengaduan di 2021: <https://dutaselaparang.com/didominasi-sektor-pendidikan-ombudsman-ntb-terima-305-pengaduan-di-2020/>
- Riko, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Rondonuwu, R. (2015). Permasalahan Pelaksanaan Pendaftaran Hak atas Tanah. *Lex et Societatis*, III(7).
- Sahnan. (2016). *Hukum Agraria Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Santoso, U. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Government (Pemerintah Yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- Sembiring, J. J. (2010). *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*. Jakarta: Visi Media.
- Setiawan S.H., M.H, A. (2019). Hukum Pertahanan. In *Pengaturan, Problematika dan Reformasi Agraria* (p. 4). Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Setiawan, A. (2019). *Hukum Pertanahan: Pengaturan, Problematika dan Reformasi Agraria*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Sinambella. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Soekanto, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soemitro, R. H. (n.d.). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiharto, U. S., & (Et.al). (2015). *Hukum Pengadaan Tanah*. Malang: Setara Press.

- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Suhady. (2005). *Dasar-dasar Good Governance*. Jakarta: UNDP.
- Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: PT Rineka Cipta.
- Sunggono, B. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Supriadi. (2010). *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2011). *Sertipikat Hak atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafrijal, M. (2021, Oktober 2). *Wakil Ketua Yang Membidangi Penetapan Hak dan Pendaftaran Pelaksanaan PTSL Kabupaten Dompus*. (T. F. Gustaman, Interviewer) Kabupaten Dompus.
- Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Taqiyyah, M. A., & Winanti, A. (2020). Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Atas Tanah Ganda Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997. *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang – undangan dan Pranata Sosial*, 5(1).
- Wibawanti, S. E., & Murjiyanto, R. (2013). *Hak Atas Tanah & Peralihannya*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Wiradi, G. (2000). Reforma Agraria. In *Perjalanan Yang Belum Berakhir* (p. 85). Jakarta: KPA.
- Wiradi, G. (2000). *Reforma Agraria: Perjalanan Yang belum Berakhir*. Jakarta: KPA.
- Zakwani, K. K. (2019). Implementasi Program Percepatan Sertifikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara). *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 71-81.